

Media Sosial Sebagai Sumber Pemahaman Politik Pemilih Pemula Di Kota Makassar

Dian Ekawati

Departemen Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar
Jl. Perintis Kemerdekaan, Km. 10, Tamalanrea, Makassar 90325
E-mail: dian.eka@gmail.com

Abstract

This paper aims to show how the social media became as an important learning space for first-time voter to get their political understanding. In addition, this paper also wants to showed the implications that may arise from that. This is important due to political understanding is an important thing that will shape the political behavior tendencies of first-time voter when they will came to use their political rights in general elections. This paper is based on the results of a qualitative research conducted in Makassar City in 2020. The research was conducted on the first-time voter segment, which is students from several high schools on how social media can be as the important source of information for their political understanding where more than their parents or school. At the end, this paper shows the role of social media for the formation of political understanding of first-time voter in placing themselves properly in a democratic system.

Keywords: First-time voter, social media, Political Understanding, Demokrasi, Makassar.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana media sosial menjadi salah satu ruang belajar penting bagi pemilih pemula dalam mendapatkan pemahaman politiknya. Selain itu tulisan ini juga menunjukkan implikasi yang mungkin timbul dari proses tersebut. Hal ini penting mengingat pemahaman politik merupakan hal yang penting yang nantinya akan membentuk kecenderungan perilaku politik pemilih pemula ketika nantinya akan menggunakan hak politiknya dalam pemilihan umum. Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian kualitatif yang dilakukan di Kota Makassar pada tahun 2020. Penelitian dilakukan terhadap segmen pemilih pemula yang merupakan siswa dari beberapa sekolah menengah atas dan sederajat tentang bagaimana media sosial dapat menjadi sumber informasi bagi pemahaman politiknya. Pada akhirnya tulisan ini menunjukkan peran media sosial bagi pembentukan pemahaman politik pemilih pemula dalam menempatkan diri secara tepat dalam sistem demokrasi.

Kata Kunci: *Pemilih Pemula, Media Sosial, Pemahaman Politik, Demokrasi, Makassar.*

Pendahuluan

Dewasa ini demokrasi merupakan sistem penataan kehidupan masyarakat baik secara sosial maupun politik yang diterima secara umum oleh warga dunia termasuk Indonesia. Hal ini nampaknya didorong oleh keyakinan akan adanya kebaikan yang akan didapatkan dengan menerapkan sistem demokrasi pada konteks masing-masing masyarakat maupun negara.

Keyakinan tersebut juga dibuktikan melalui hasil penelitian dan penilaian yang dilakukan oleh beberapa lembaga internasional yang fokus terhadap demokrasi. Paling tidak sejauh ini terdapat lebih dari 60 persen negara di dunia yang mengaku sebagai negara demokrasi melalui berbagai indikator yang dianggap merupakan ciri demokrasi.¹ Keyakinan terhadap demokrasi nampaknya dibayangi oleh harapan akan kebaikan hidup masyarakat. Masyarakat akan terlibat dalam proses keputusan publik dan sekaligus akan meminta pertanggungjawaban dari mereka yang mendapatkan otoritas formal dalam melakukannya. Demokrasi dilekatkan pada keyakinan bahwa pada akhirnya rakyatlah yang akan menentukan.

Demokrasi tidak hanya melibatkan pelaksanaan sekelompok hak sipil, politik, dan sosial (kebebasan berbicara, pers, dan perakitan; hak untuk memilih dalam pemilihan yang bebas dan adil; universal dan pendidikan gratis; dan sebagainya), tetapi juga pengejaran dan pemberlakuan hak-hak ini dalam struktur kekuasaan. Demokrasi dapat dipertahankan sepenuhnya hanya di dalam dan melalui lembaga-lembaga dan organisasi yang membentuk elemen dari namun melintasi batas wilayah negara-bangsa. Kemungkinan demokrasi hari ini, singkatnya, harus dikaitkan dengan kerangka kerja demokrasi yang berkembang pada berbagai negara dan lembaga.²

Kenyataan tersebut nampaknya menjadi indikasi kuat adanya kesepakatan dari mayoritas negara-negara di dunia untuk menerima dan mengimplementasikan demokrasi di wilayahnya dengan harapan adanya kebaikan bagi masyarakatnya. Dengan demikian, dewasa ini demokrasi tidak lagi didiskusikan pada baik tidaknya pada suatu konteks masyarakat, namun pada upaya nyata untuk mewujudkannya secara lebih tepat dengan menempatkan kedaulatan rakyat sebagai aspek paling utamanya. Hal ini tentu sejalan dengan prinsip utama demokrasi sejak awal yang dalam Bahasa Yunani disebut sebagai *Demos* (masyarakat) *Kratos* (memerintah). Pemahaman ini menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk memerintah termasuk dalam menentukan orang-orang yang nantinya akan disetujui melaksanakan amanah tersebut. Oleh karena itu, salah satu aspek penting yang diharapkan dari demokrasi adalah adanya partisipasi yang efektif dari masyarakat dalam kerangka melaksanakan

¹Landman, T. (2011). Assessing the Quality of Democracy: The International IDEA Framework. *European Political Science*, 11(4), pp. 456-468.

²Held, David (1993) *Democracy: Past, Present, and Possible Futures Alternatives*: Global, Local, Political, Vol. 18, No. 3 (Summer 1993), pp. 259-271

kedaulatan rakyat.³ Hal ini tentu meliputi partisipasi dari seluruh elemen masyarakat termasuk partisipasi dari kalangan pemilih pemula.

Pemilih pemula merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang juga terkait dalam konsepsi ***Demos*** pada konteks demokrasi. Dengan demikian, partisipasi mereka dalam konteks menerima demokrasi sebagai sistem yang membawa kebaikan dimana salah satunya diwujudkan melalui pemilu merupakan hal penting. Hal tersebut sangat penting untuk diwujudkan mengingat amanat konstitusi menempatkan seluruh masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tentu saja termasuk pemilih pemula. Dengan demikian maka partisipasi pemilih pemula dalam berbagai ruang implementasi demokrasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan upaya menjalankan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, termasuk melalui pemilu.

Pemilu merupakan salah satu aspek penting sebagai indikator bekerjanya demokrasi. Oleh karena itu pemilu sudah seharusnya menjadi ruang keterlibatan setiap segmen dalam masyarakat yang dimungkinkan oleh hukum tanpa kecuali termasuk segmen pemilih pemula. Berdasarkan ketentuan konstitusi, tidak ada perbedaan atas hak dalam berpartisipasi bagi para pemilih pemula dengan golongan masyarakat dewasa. Semuanya memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam ruang politik sejauh memenuhi syarat perundang-undangan. Dalam hal ini, pemilih pemula dianggap sebagai segmen masyarakat yang telah memiliki pemahaman politik yang sama dengan segmen dewasa.

Prinsip Kesetaraan yang dijunjung tinggi dalam demokrasi memang memberikan peluang partisipasi yang tidak bersifat inferior terhadap kalangan dewasa. Namun di saat bersamaan terdapat permasalahan terkait dengan asumsi kesetaraan pemahaman dan pengetahuan dalam berpartisipasi. Hal ini tentu menarik mengingat terdapat kecenderungan bahwa segmen pemilih pemula belum betul-betul setara dalam hal pemahaman, termasuk dalam hal keleluasaan dalam mencari pengetahuan dan menunjukkan sikap politiknya. Selama ini terdapat kecenderungan dalam teori demokrasi dan ilmu pengetahuan sosial yang menunjukkan anak muda dan politik tidak dapat berjalan secara baik bersamaan. Artinya anak-anak yang masih berusia muda ini dianggap belum dapat mengikuti dinamika politik dengan baik.⁴ Selain dianggap minim pengetahuan dan pengalaman,

³Biegelbauer, Peter and Janus Hansen (2011) Democratic theory and citizen participation: democracy models in the evaluation of public participation in science and technology. *Science and Public Policy*, Volume 38, Issue 8, (October), pp. 589–597.

⁴Abendschön, Simone (2017) Children and Politics. *American Behavioral Scientist* 2017, Vol. 61(2), pp. 163–166

warga masyarakat yang masih berusia muda terutama para pemilih pemula juga dianggap masih sangat dipengaruhi oleh kecenderungan perilaku dan orientasi politik keluarganya terutama para orang tua.⁵

Pada dasarnya pemilih pemula dimaknai dalam pemaknaan yang beragam, namun secara umum di dalam tulisan ini pemaknaan atas pemilih pemula diletakkan pada pemahaman sebagai “orang yang baru pertama kali memiliki hak memilih karena telah mencukupi usianya sesuai ketentuan”.⁶ Sebagai bagian dari masyarakat yang baru akan menggunakan hak pilihnya, segmen ini cenderung dilihat sebagai bagian dari masyarakat yang rentan secara politik baik terkait dengan pemahaman maupun kemandirian. Lebih lanjut, segmen ini masih cenderung dianggap sebagai segmen pemilih yang cenderung apatis sehingga membutuhkan strategi pendekatan khusus dalam memahami kecenderungan perilaku politiknya.⁷ Salah satu alasannya adalah terkait tingkat pemahaman politik mereka yang dianggap masih kurang atau belum komprehensif sehingga kecenderungan politiknya dianggap masih belum stabil.

Lebih jauh, kecenderungan mereka dalam politik dianggap sebagai representasi dari kecenderungan dan orientasi politik orang tua atau keluarga. Dalam hal ini orang tua bahkan dianggap menjadi faktor paling dominan dalam mempengaruhi pemahaman politik mereka.⁸ Hal ini nampaknya sangat terkait dengan kecenderungan pemahaman bahwa orang tua masih menjadi aspek utama dalam masa perkembangan berfikir mereka.⁹ Dengan demikian maka Sebagian besar pemahaman politik mereka dianggap didapatkan dari orang tua, terutama pada fase-fase awal pembentukan pemahaman awal mereka.¹⁰ pemahaman ini masih cukup kuat mendasari asumsi tentang pembentukan pemahaman politik pemilih pemula. Namun dalam perkembangan dunia dewasa ini nampaknya terdapat kecenderungan pergeseran atas asumsi tersebut. Jika sebelumnya, posisi orang tua seolah menjadi sumber referensi

⁵Sukri et.al (2021). “The Forming of First-Time Voters’ Political Preference in Indonesia”, *Youth Voice Journal*. pp 1-18.<https://www.rj4allpublications.com/product/the-forming-of-first-time-voters-political-preference-in-indonesia>

⁶Niels Nørgaard Kristenseng and Trond Solhaug (2016) Students as First-time Voters: The Role of Voter Advice Applications in Self-reflection on Party Choice and Political Identity. *Journal of Social Science Education* Volume 15, Number 3, p. 32.

⁷Jacqueline Laughland-Booy et.al (2018). “The voting strategies of young people: a conceptual framework” dalam *Australian Journal of Political Science*. Volume 53, Issue 2, pp. 143-159.

⁸Primandha Sukma Nur Wardhani (2018) “Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum” dalam *JUPIIS Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial* 10 (1) 57, p. 57-62.

⁹ Sukri et.al. op.cit. p. 7.

¹⁰M. Ekstrom and Ostman J, (2013) “Family talk, peer talk, and young people's civic orientation” dalam *European Journal of Communication* 28 (3), p. 295

politik paling penting terdapat kecenderungan bahwa para pemuda saat ini mendapatkan ruang dan sumber informasi baru yang nampaknya memberikan kesan yang cukup kuat pada pembentukan pemahaman politik mereka yakni media sosial. Hal ini tentu menjadi menarik jika melihat kecenderungan besarnya pengaruh media sosial saat ini dikalangan muda yang tentu saja didalamnya termasuk para pemilih pemula. Hal ini juga menjadi menarik mengingat potensi efek dari pemanfaatan sosial media dalam dunia politik saat ini yang memunculkan beberapa fenomena kontroversial terkait hoax dan penyebaran isu-isu negatif.¹¹

Berdasarkan berbagai pemahaman tersebut maka Tulisan ini mencoba untuk menunjukkan mengapa Sosial media dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan politik terutama bagi pemilih pemula. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kota Makassar pada tahun 2020 pada kalangan pemilih pemula, tulisan ini juga sekaligus bagaimana pergeseran terjadi dari orang tua ke media sosial dan sebagai sumber pengetahuan yang membentuk pemahaman politik pemilih pemula.

Metode

Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian kualitatif yang dilakukan pada bulan Mei hingga September tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada informan dari kalangan pemilih pemula. Para informan merupakan pelajar dari beberapa Sekolah di wilayah Makassar dan sekitarnya. Sekolah yang didasarkan pada beberapa kategori yakni Sekolah negeri dan sekolah Swasta, Sekolah berdasarkan Identitas Agama, sekolah yang menerapkan sistem asrama serta melihat aspek status sebagai sekolah unggulan dan non-unggulan.

Seluruh informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria keaktifan mereka pada organisasi intra sekolah. Hal tersebut dijadikan dasar untuk dapat mendapatkan data lebih dalam mengingat mereka diasumsikan memiliki pengalaman interaksi organisasi yang cukup. Dengan demikian pada tahap awal telah memiliki kesadaran awal tentang aspek interaksi hak dan kewajiban sebagai bagian dari suatu komunitas dan memiliki kesadaran tentang bagaiman seharusnya mereka berperilaku dan menempatkan diri dalam komunitas tersebut secara tepat. Hal ini yang kemudian diasumsikan sebagai suatu indikator awal atas pemahaman mereka dalam menempatkan diri sebagai bagian dari kehidupan sistem demokrasi.

¹¹Duile Timo & Sukri Tamma (2021) Political language and fake news, Indonesia and the Malay World, 49:143, pp. 82-105

Pengetahuan sebagai kunci Partisipasi Politik

Pada dasarnya, elemen dasar dari perilaku politik demokrasi adalah partisipasi warga negara dalam proses politik. Terkait dengan hal tersebut maka faktor yang menentukan partisipasi politik yang baik adalah adanya pengetahuan politik yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan politik merupakan konsep kunci bagi adanya perilaku politik pada berbagai konteks dan bentuknya. Pengetahuan politik diyakini akan mencerminkan nilai-nilai politik yang ada dalam masyarakat.¹²

Secara umum, pengetahuan memainkan peran penting bagi kemajuan individu dan masyarakat. Hal ini juga berlaku dalam memahami pentingnya pengetahuan politik terutama dalam kaitan dengan partisipasi masyarakat dalam sistem politik yang ada, dalam hal ini demokrasi.

Demokrasi membutuhkan pengetahuan politik tidak hanya bagi para politisi namun juga bagi masyarakatnya. Dengan Prinsip demokrasi yang meletakkan rakyat sebagai pilar paling mendasar maka masyarakat tentu diharapkan dapat berperilaku secara tepat dan pantas dalam sistem ini.¹³ Dengan demikian tanpa pengetahuan yang memadai maka masyarakat sangat mungkin akan kesulitan dalam mengekspresikan sikap politiknya secara tepat pada ruang-ruang partisipasi politik.

Hal ini diletakkan pada pemahaman bahwa tanpa pengetahuan yang cukup maka sulit bagi seseorang untuk dapat betul-betul menempatkan dirinya secara tepat pada suatu sistem politik yang ada. Hal ini tentu saja akan berpotensi pada perilaku yang keliru dan tentu saja berpotensi memunculkan implikasi yang tidak diharapkan.¹⁴

Terkait dengan pemahaman bahwa partisipasi sebagai sebuah aspek dan pemahaman akan sistem kehidupan bersama dalam demokrasi maka tentu saja warga negara diharapkan memiliki tingkat pengetahuan tertentu tentang masalah politik. Hal ini penting mengingat pengetahuan politik pada dasarnya langsung terkait dengan partisipasi warga sebagai unsur penting dalam sistem demokrasi.¹⁵

Dengan demikian gagasan bahwa pengetahuan politik akan memberikan pengaruh terhadap berbagai perilaku misalnya pada pemilu sebagai perwujudan demokrasi tidak dapat dielakkan.¹⁶ Pengetahuan politik

¹²Pastarmadzhieva, D (2015) Political Knowledge: Theoretical Formulations and Practical Implementation. *Trakia Journal of Sciences*, Vol. 13, Suppl. 1, pp 16-21.

¹³Ibid. p. 18.

¹⁴Marquis, Lionel (2010) Understanding Political Knowledge and its Influence on Voting Preferences in the 2007 Federal Election. *Swiss Political Science Review* 16(3), pp. 425-56

¹⁵ Pastarmadzhieva, D. Op.Cit. p. 19.

¹⁶ Marquis, Lionel. Op.cit. p. 430.

dianggap akan menjadi landasan dalam menunjukkan perilaku politik yang, misalnya dalam pemilu. Dalam pandangan ini peran pengetahuan politik dapat menjadi dasar dalam membuat keputusan atas sikap politik yang akan ditunjukkan.

Dalam kaitan dengan demokrasi, aspek pengetahuan menjadi penting mengingat upaya untuk membangun partisipasi politik yang baik membutuhkan suatu kerangka pengetahuan yang baik pula. Dengan pemahaman tersebut maka setiap segmen masyarakat ikut berpartisipasi dalam ruang-ruang politik dalam sistem demokrasi diyakini akan mampu menempatkan diri dengan baik melalui kepemilikan atas pemahaman yang memadai¹⁷. Hal ini tentu juga terkait dengan segmen pemilih pemula.

Pemilih pemula yang merupakan bagian dari masyarakat yang dipandang belum memiliki pemahaman politik yang memadai seringkali dianggap kurang siap untuk dapat berpartisipasi dengan baik.¹⁸ Kondisi ini salah satunya terkait dengan kecenderungan masih kurangnya pemahaman politik yang dimiliki. Selama ini pemahaman politik pemilih pemula cenderung dipandang senantiasa sejalan dengan kecenderungan yang dimiliki oleh orang tua mereka. Hal ini sangat mungkin mengingat orang tua tetap dianggap memainkan peran penting dalam pembentukan pengetahuan anak. Dengan demikian, meski di sekolah juga terdapat kegiatan maupun pelajaran yang memungkinkan pemilih pemula untuk mempelajari aspek politik namun orang tua tetap dianggap cenderung memiliki posisi yang dominan.¹⁹ Hal ini terkait dengan ruang informasi yang nampak terbatas dalam mempelajari politik sebagai sebuah pengetahuan.

Pada dasarnya sekolah menawarkan ruang belajar yang baik kepada para pemilih pemula yang memang berada dalam usia sekolah termasuk yang ada pada sekolah menengah atas. Namun keterbatasan yang ada terkait aktivitas dan tawaran pembelajaran karena adanya kebijakan kurikulum sekolah menjadikan sekolah tidak bisa menawarkan informasi yang lebih banyak.²⁰

Adapun orang tua, dengan variasi pengetahuan yang tidak merata diantara para orang tua maka informasi yang dapat diterima oleh pemilih pemula juga akan terbatas sejauh pemahaman para orang tuanya. Meski

¹⁷ Sergiu Gherghina and Brigitte Geissel, "Linking Democratic Preferences and Political Participation: Evidence from Germany" dalam *Political Studies* Vol. 65(1S) (2017), h. 25.

¹⁸ Yoldaş. op.cit. h. 545.

¹⁹ Tamma, Sukri (2021) Pendidikan Kewarganegaraan dan Pembentukan Preferensi Politik Awal Pemilih Pemula. *Jurnal Politik Profetik* Volume 9, No. 1, pp. 43-57.

²⁰ Ariana dkk (2021) Kebijakan Pendidikan dan Media Sosial Sebagai Faktor Pembentukan Preferensi Politik Pemilih Pemula di Kota Makassar. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Volume 7 No. 1, Juni, pp. 65- 80.

sangat mungkin ada orang tua yang mungkin memiliki keterkaitan langsung dengan politik atau bahkan sebagai aktor politik, namun tetap saja ada hal yang membatasi pemilih pemula untuk dapat mengakses informasi dalam mengembangkan pemahaman politiknya. Salah satu hal yang dianggap cukup menghambat adalah adanya kecenderungan prinsip otoritas orang tua yang mendominasi proses transfer pengetahuan. Hal ini cenderung dirasakan oleh pemilih pemula sebagai suatu pengekanan yang tidak memberikan ruang eksplorasi besar bagi mereka.²¹ Hal inilah kemudian menjadi alasan bagi para pemilih pemula untuk mencoba menemukan ruang pengetahuan lain yang dapat memfasilitasi upaya mereka dalam mendapatkan informasi politik yang nantinya memberi pengaruh pada pemahaman politik mereka.

Media Sosial sebagai sumber Informasi bagi Pemilih Pemula

Media sosial adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada bentuk media baru yang melibatkan interaksi partisipatif. Dalam perkembangannya, media terbagi atas dua klasifikasi usia, *the broadcast age* dan *the interactive age*. Pada klasifikasi pertama, media hampir secara eksklusif terpusat di mana satu entitas seperti stasiun radio atau televisi, perusahaan surat kabar, atau studio produksi film dalam menyalurkan pesan kepada banyak orang. Umpan balik ke kepada media ini sering tidak langsung, tertunda, dan impersonal. Komunikasi yang dimediasi antar individu biasanya terjadi pada tingkat yang jauh lebih kecil, biasanya melalui surat pribadi, panggilan telepon, atau kadang-kadang pada skala yang sedikit lebih besar melalui sarana seperti buletin keluarga.²²

Dewasa ini, media sosial nampak menjadi bagian mendasar dari kehidupan sehari-hari oleh banyak orang. Media sosial dianggap memberikan berbagai informasi dalam dinamika kehidupan sehari-hari manusia. Saat ini, media sosial yang paling umum situs saat ini adalah Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Instagram, Whatsapp dan lain sebagainya. Berbagai situs tersebut menawarkan kemudahan untuk mengakses dan ikut bergabung dalam interaksi yang disediakan platform tersebut. Hal ini menjadikan banyak orang mencoba untuk memanfaatkannya sebagai ruang dan metode baru dalam berinteraksi termasuk dalam mengakses informasi maupun saling bertukar pemikiran.

Dengan munculnya teknologi digital dan seluler, interaksi dalam skala besar menjadi lebih mudah bagi individu daripada sebelumnya; dan dengan demikian, era media baru lahir di mana interaktivitas ditempatkan di pusat

²¹ Sukri et. al. op.cit. p. 7.

²² Manning, J. (2014.) Social media, definition and classes of. In K. Harvey (Ed.), Encyclopedia of social media and politics. pp. 1158-1162.

fungsi media baru. Seseorang dapat berbicara dengan banyak orang sekaligus, dan suatu respon atau umpan balik yang cepat adalah suatu keniscayaan. Selain itu, media sosial memungkinkan untuk diakses dengan biaya rendah dan dengan aksesibilitas teknologi yang baru maka memungkinkan lebih banyak pilihan untuk konsumsi media daripada sebelumnya. Dengan demikian saat ini orang dapat mencari informasi dari beberapa sumber serta berdialog dengan orang lain dalam forum virtual melalui pesan tentang informasi yang diposting.²³ Hal ini menunjukkan besarnya efek perkembangan teknologi dalam hal ini media sosial dalam aspek komunikasi dan upaya mendapatkan informasi bagi masyarakat dewasa ini.

Semua media sosial melibatkan platform digital, baik itu melalui seluler atau stasioner. Dalam membantu upaya untuk mendefinisikan media sosial, terdapat dua karakteristik yang dapat dicermati. *Pertama*, media sosial memungkinkan beragam bentuk partisipasi. Media sosial tidak pernah sepenuhnya pasif. Biasanya, minimal, profil harus dibuat yang memungkinkan untuk awal potensi interaksi. Hal tersebut yang membedakan media sosial dari media tradisional. *Kedua*, sejalan dengan sifatnya yang partisipatif, media sosial melibatkan interaksi. Interaksi ini dapat bersama teman, keluarga, atau kenalan yang memiliki kesamaan minat atau bahkan lingkaran kenalan yang sama atau dengan orang lain.²⁴

Meskipun orang telah menggunakan internet untuk terhubung dengan orang lain sejak awal 1980-an, namun baru pada dekade terakhir ini jejaring media sosial mengalami peningkatan dalam penggunaannya. Hal ini kemudian menjadi suatu praktek yang dipandang sebagai hal yang umum dan diterima sebagai kewajaran yang diterima secara luas termasuk dikalangan kaum muda.²⁵ Bagi kalangan muda, Media sosial nampaknya telah berubah menjadi salah satu sumber informasi penting dalam berbagai kebutuhan mereka. Sosial media dianggap menjadi sebuah tawaran ruang dan metode baru dalam menyampaikan pendapat, menemukan informasi, melakukan diskusi maupun debat sosial²⁶. Hal ini ditunjukkan misalnya bagaimana kalangan muda beralih ke media sosial dan teknologi digital untuk yang berhubungan dengan informasi tertentu yang mereka inginkan meski hal tersebut tetap dibayangi oleh adanya kebingungan dan ketidakpastian tentang bagaimana perilaku ini

²³ Ibid. p. 1158.

²⁴ Ibid. p. 1159.

²⁵ Johnson, L., Levine, A., Smith, R., Smythe, T., & Stone, S. (2009). *The Horizon Report: 2009 Australia–New Zealand Edition*. Austin, Texas: The New Media Consortium.

²⁶ Collins, R. L., Martino, S. C., & Shaw, R. (2011). *Influence of new media on adolescent sexual health: Evidence and opportunities*. Working Paper WR-761. Retrieved from <http://aspe.hhs.gov/hsp/11/adolescentsexualactivity/newmedialitrev/index.pdf>

berdampak mereka.²⁷ Melalui media sosial yang menawarkan banyak sekali pilihan informasi outlet termasuk informasi politik, maka para kaum muda ini dapat dengan mudah memasukkan politik ke dalam kehidupan sehari-hari mereka bahkan menjadikannya bagian dari gaya hidup mereka.²⁸ Karena itu, sebagian besar remaja tidak menggunakan situs web ini secara eksplisit secara politis, dan jika kami mengharapkan penggunaan tersebut memiliki implikasi yang lebih luas, penting untuk memahami individu mana yang memilih untuk melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa kaum muda merasa menemukan suatu sumber informasi penting yang sesuai dengan semangat dan konteks mereka sebagai orang muda.

Hal tersebut nampaknya terkait dengan adanya rasa bosan dari kaum muda ini dengan sumber informasi melalui orang tua maupun kegiatan di sekolah termasuk dari media-media tradisional yang ada selama ini. Melalui media sosial mereka merasa menemukan ruang yang terasa lebih nyaman bagi ekspresi mereka. Media sosial memberikan mereka perasaan lebih bebas dan tidak terintimidasi atau tertekan dalam menemukan informasi sekaligus mengekspresikan keingintahuan mereka akan berbagai hal termasuk informasi tentang politik.

Sebagai bagian dari kaum muda yang terdampak perkembangan media sosial, para pemilih pemula yang sebagian besar berada dalam usia sekolah dan merupakan siswa sekolah menengah atas nampaknya berada dalam konteks kondisi ini. Mereka melihat ruang atau jejaring yang disediakan media sosial memungkinkan mereka terhubung dengan teman maupun orang lain dalam konteks yang lebih cair. Artinya interaksi mereka tidak terbangun dalam suatu pola yang terdominasi oleh nilai-nilai sosial tertentu misalnya keharusan untuk menghormati orang tua dengan tidak berbeda pendapat. Padahal pada beberapa hal, senantiasa terdapat kemungkinan perbedaan pendapat yang menurut mereka seharusnya dapat didiskusikan dalam konteks mencari hal-hal yang dapat dipertemukan. Namun dalam pola hubungan dengan orang tua, kecenderungan dominatif orang tua seringkali dirasakan sebagai hambatan untuk berdiskusi bagi pemilih pemula.

Oleh karena itu, mereka lebih cenderung untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan diskusi maupun mendapatkan informasi melalui jaringan media sosial yang membuat mereka dapat berpartisipasi tanpa merasa adanya intimidasi dan pembatasan-pembatasan yang mungkin ditemukan dalam interaksi dengan orang tua. Hal ini membuat pemilih pemula

²⁷ Good year, Victoria, Kathleen Armour, and Hannah Wood (2018) *The Impact of Social Media on Young People's Health And Wellbeing: Evidence, Guidelines, and Actions*. University of Birmingham.

²⁸ Wojdan, Witold et. al. (2021) *The impact of social media on the lifestyle of young people*. *Polish Journal of Public Health* 130 (1), pp. 8-13

cenderung merasa lebih nyaman dalam mengekspresikan dirinya. Dengan demikian, selain informasi secara satu arah, melalui media sosial, pemilih pemula juga dapat melakukan diskusi interaktif secara partisipatif. Hal ini tentu menjadi peluang bagi mereka untuk lebih banyak melakukan eksplorasi pada berbagai informasi atau pemikiran yang mereka dapatkan. Dengan konteks yang cenderung lebih setara dan cair, maka proses yang dilakukan oleh pemilih pemula pada media sosial akan terasa lebih egaliter dan tanpa dominasi yang sangat kuat seperti ketika mereka berdiskusi dengan orang tua.

Selain itu media sosial juga dirasakan pemilih pemula sebagai ruang yang tidak membosankan karena informasi disediakan sangat banyak bahkan yang bersifat paling aktual. Hal ini menjadikan merasa senantiasa berada pada posisi terdepan untuk mendapatkan informasi terbaru. Dengan demikian mereka senantiasa memiliki aspek perkembangan informasi yang baik terkait dengan perkembangan informasi politik. Kenyataan bahwa dalam decade terakhir ini banyak sekali informasi dan literatur politik yang diupload melalui sosial media telah menjadikan sosial media sebagai suatu ruang informasi yang hampir tidak terbatas. Hal ini kemudian menjadi daya Tarik tersendiri yang menyebabkan media sosial menjadi menarik bagi keterlibatan pemilih pemula di dalamnya terkait dengan upaya mendapatkan pemahaman politik.

Hal ini menunjukkan bahwa sosial media memainkan peran penting dalam memberikan informasi kepada tentang politik kepada pemilih pemula dan mampu mendorong mereka untuk terlibat secara partisipatif. Hal ini menjadikan pemilih pemula memiliki ruang diskusi dua arah yang ditawarkan oleh sosial media. Kondisi ini pada dasarnya memberikan bermanfaat dan mendorong pemuda untuk berpartisipasi dalam ruang terkait politik.²⁹ Media sosial nampak mendapatkan posisinya sebagai ruang dan sumber informasi yang semakin penting untuk menyebarkan informasi politik³⁰. Namun, meski membuka potensi besar untuk mendapatkan informasi tentang politik dan bahkan terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan politik yang dapat membantu perkembangan pemahaman pemilih pemula, namun media sosial ternyata juga memiliki potensi negative.

Meski media sosial menjadi salah satu sumber informasi terbesar bagi banyak penggunanya termasuk pemilih pemula, namun ia juga memiliki potensi besar untuk kehadiran kondisi disinformasi terkait dengan

²⁹ Quintelier, Ellen and Sara Vissers (2008) The Effect of Internet Use on Political Participation: An Analysis of Survey Results for 16-Year-Olds in Belgium. *Social Science Computer Review*. Vol 26, Issue 4, pp. 411-427

³⁰ McAllister, I. (2015). Internet use, political knowledge and political participation among young voters in Australia. *The Conference Democracy: A Citizen Perspective*, Åbo Akademi University, Turku, Finland.

manipulasi-manipulasi informasi dalam kaitannya dengan politik. Dengan efek media sosial yang telah dijelaskan sebelumnya dalam menyediakan informasi dan mendorong partisipasi politik, maka disinformasi yang mungkin terjadi di dalamnya juga akan memberikan efek pada konteks tersebut yang pada dasarnya menunjukkan efek ganda kehadiran media sosial pada informasi dan partisipasi terhadap politik.³¹

Dewasa ini, penyebaran informasi negatif melalui media sosial nampaknya tengah marak termasuk dalam kaitannya dengan aspek politik. Penyebaran hoaks atau berita bohong di media sosial pada dasarnya akan berkontribusi pada hadirnya informasi yang tidak benar yang bahkan dapat menjadi fitnah yang menimbulkan ketegangan dan keresahan dalam masyarakat. Penyebaran ini terutama seringkali ditemukan dalam kaitannya dengan peristiwa politik misalnya pemilu maupun pilkada di berbagai daerah pada dasarnya menjadi suatu kerangka model menyapiakan pesan baru yang beresonansi dengan kepercayaan yang ada di masyarakat. Akibatnya, hoaks dapat menciptakan budaya berdasarkan kepercayaan bersama di antara masyarakat dan, dalam era polarisasi yang semakin meningkat, hoaks berpotensi menjadi sarana keberpihakan politik. Namun, dengan kecenderungan untuk mengalahkan kebenaran dan menjauhkan orang dari mempercayai fakta, hoaks bisa menjadi ancaman bagi demokrasi partisipatif.³²

Dengan kondisi bahwa media sosial dipercaya menawarkan ketersediaan yang luas dan fasilitas untuk bertukar informasi maka media sosial akan senantiasa menjadi sumber yang diterima orang banyak. Selain itu kemampuannya menyediakan ruang bagi orang-orang untuk berkumpul kepentingan dan membentuk pemahaman bersama menjadikan informasi yang ada pada media sosial akan dapat menyebar dengan cepat ke seluruh jaringan dan menjadi viral. Dengan demikian, media sosial memiliki potensi besar sebagai sumber penyebaran informasi secara luas yang dapat memberi pengaruh pada pemahaman politik orang yang mengaksesnya termasuk pada informasi-informasi hoaks.³³ Hal ini menjadi potensi bahaya dalam terkait dengan upaya mendapatkan informasi yang baik dan tepat untuk mengembangkan pemahaman politik termasuk bagi pemilih pemula. Hal ini sangat mungkin mengingat media sosial memang menyediakan akses cepat cara untuk menyampaikan informasi atau pendapat sepihak namun tanpa

³¹ Nam, T. (2012). Dual effects of the internet on political activism: Reinforcing and mobilizing. *Government Information Quarterly*, 29, pp. 590-597.

³² Utami, Pratiwi (2018) Hoax in Modern Politics: The Meaning of Hoax in Indonesian Politics and Democracy. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 22, Issue 2, November, pp. 85-97

³³ Ibid. p. 87.

memiliki kemampuan untuk memverifikasi keasliannya.³⁴ Dengan demikian, kenyataan bahwa pemilih pemula semakin banyak menggunakan media sosial sebagai sumber informasi maka akan semakin besar juga peluang mereka akan bertemu dengan informasi-informasi hoax. Artinya sanga besar kemungkinan pemilih pemula menjadikan informasi yang keliru sebagai dasar membentuk pemahaman politiknya. Dengan kenyataan bahwa sikap politik salah satunya dipengaruhi oileh informasi yang didapatkan melalui media,³⁵ maka informasi yang didapatkan akan memberi pengaruh pada keputusan yang diambil. Dukungan media sosial memang menjadi cara yang sangat menarik bagi pemilu untuk mendapatkan informasi politik bagi pemahamn politik mereka. Namun hal ini kemudian menimbulkan celah pada bagaimana pemilih pemula melakukan evaluasi pada potensi informasi-informasi keliru termasuk hoax dengan kemampuan dan informasinya yang masih kurang. Hal ini yang nampaknya menjadi celah atas kehadiran media sosial sebagai sumber informasi bagi pemahaman politik pemilih pemula. Pada titik ini, terdapat keuatiran bahwa tidak ada aspek dan nilai evaluative yang dilakukan oleh para pemilih pemula ketika mereka menjadi pembelajar politik mandiri dari media sosial. Hal ini menuntut para pemilih pemula untuk memiliki kemampuan menyaring informasi dan menentukan nilai-nilai kebenaran atas suatu informasi. Artinya pemilih pemula diharapkan memliki kemampuan evaluasi yang baik. Memang terdapat beberapa pemilih pemula yang sudah memiliki dasar pemahaman yang cukup untukm melakukan evaluasi atas informasi yang didapatkan dari media sosial. Mereka ini datang dari keluarga yang memilikim pemahmana tentang politik yang baik dan senantiasa mendapatkan ruang diskusi yang egaliter dengan keluarga maupun oramng tuanya. Pada pemilih pemula yang tidak mendapatkan hal yang sama nampaknya memiliki sedikit kesulitan untuk melakukannya. Kehadiran berbagai informasi yang terkadang terlihat benar dalam berbagai bentuk membuat pemilih pemula kesulitan dalam menentukan sikap yang tepat. Dalam hal ini, nampaknya kehadiran orang tua masih diharapkan terutama untuk membantu mengkonfirmasi maupun mengevaluasi beragam infrmasi yang mereka terima. Dengan demikian, kehadiran media sosial memang memberikan ruang baru dalam pembentukan pemahaman politik pemilih pemula dengan beragam informasi yang begitu banyak. Namun hal tersebut tidak serta merta menghilangkan arti penting keberadaan orang tua. Meski terlihat adanya kecenderungan dimana pemilih pemula lebih melihat sosial

³⁴ Vicario, M. D., Bessi, A., Zollo, F., Petroni, F., Scala, A., Caldarelli, G., . . . Quattrociocchi, W. (2016). The Spreading of Misinformation Online. In *Proceeding of National Academy of Sciences* (3rd ed., Vol. 113, pp. 554-559). Washington: National Academy of Sciences

³⁵ Shah DV, Cho J, Eveland WP, et al. (2005) Information and expression in a digital age modeling Internet effects on civic participation. *Communication Research* 32(5): 531-565.

media sebagai sumber informasi yang sangat menarik dan lebih banyak beraktifitas melalui berbagai bentuk platformnya dalam kaitan dengan upaya memahami politik. Namun hal tersebut tidak secara serta merta menggantikan atau menghilangkan posisi orang tua. Orang tua nampaknya masih tetap dibutuhkan untuk membantu mengevaluasi informasi yang mereka terima sebagai sebuah upaya proses trasver pemahaman³⁶. Namun posisi mereka tidak lagi menjadi paling dominan seperti yang diasumsikan selama ini. Telah terjadi pergeseran cukup signifikan dari kecenderungan perilaku pemilih pemula dalam konteks eksistensi demokrasi. Hal ini tentu saja penting mengingat pemilih pemula tidak lagi hanya dilihat sebagai warga negara masa depan tetapi juga sebagai warga negara saat ini.³⁷ Dengan demikian, aspek pemahaman politik kaum muda dalam hal ini para pemilih pemula harus senantiasa mendapat perhatian penting dan tidak dapat diabaikan karena merupakan bagian dari konsepsi *Demos* yang memiliki kedaulatan dalam konsepsi substansial demokrasi.

Kesimpulan

Dalam demokrasi aspek partisipasi merupakan salah satu aspek penting yang harus senantiasa diwujudkan dengan baik. Oleh karena partisipasi dari seluruh elemen masyarakat yang dikonsepsikan sebagai *demos* itu penting termasuk dari kalangan pemilih pemula. Salah satu ruang partisipasi penting dalam demokrasi adalah pemilu. Melalui partisipasi masyarakat termasuk dalam pemilu maka eksistensi demokrasi akan dapat dipertahankan dan nilai kebaikannya dapat diwujudkan.

Mengingat pentingnya posisi partisipasi dalam demokrasi termasuk pemilu, maka hal tersebut harus dapat dilakukan dengan baik. Dengan demikian penting bagi setiap orang yang akan berpartisipasi untuk memiliki pemahaman politik yang baik, termasuk para pemilih pemula. Salah satu aspek yang terkait dengan pemahaman yang baik adalah sumber informasi politik. Selama ini terdapat kecenderungan bahwa sumber informasi bagi pemahaman politik pemilih pemula didapatkan dari sekolah dan keluar terutama para orang tua. Namun ternyata hal tersebut telah mengalami pergeseran dimana orang tua tidak lagi menjadi sumber yang dominan, hal tersebut nampaknya digantikan oleh sosial media.

³⁶ Bode, Leticia, Emily K. Vraga, Porismita Borah, and Dhavan V. Shah (2013) A New Space for Political Behavior: Political Social Networking and its Democratic Consequences. *Journal of Computer-Mediated Communication* 19, pp. 414–429.

³⁷ van Deth, J. W., Abendschön, S., & Vollmar, M. (2011). Children and politics: An empirical reassessment of early political socialization. *Political Psychology*, 32, 147-173.

Dengan tawaran informasi yang sangat banyak dan bervariasi, akses yang murah dan dirasakan berlangsung dalam semangat egaliter yang tanpa dominasi berlebihan seperti yang mereka rasakan ketika berhadapan dengan orang tua, menjadikan media sosial sebagai sumber penting bagi pembentukan pemahaman politik pemilih pemula. Meski demikian penggunaan media sosial memiliki celah terutama terkait dengan kemampuan pemilih pemula dalam mengelola informasi yang diterimanya secara evaluatif terutama terkait dengan potensi informasi yang keliru ataupun hoax. Oleh karena itu, meski tidak lagi dominan namun nampaknya posisi orang tua tetap penting terutama sebagai tempat untuk mengkonfirmasi informasi dan pemahaman politik yang dimiliki pemilih pemula.

Daftar Pustaka

- Abendschön , Simone (2017) Children and Politics. *American Behavioral Scientist*, Vol. 61(2), pp. 163–166.
- Ariana dkk (2021) Kebijakan Pendidikan dan Media Sosial Sebagai Faktor Pembentukan Preferensi Politik Pemilih Pemula di Kota Makassar. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Volume 7 No. 1, Juni, pp. 65- 80.
- Biegelbauer, Peter and Janus Hansen (2011) Democratic theory and citizen participation: democracy models in the evaluation of public participation in science and technology. *Science and Public Policy*, Volume 38, Issue 8, (October), pp. 589–597.
- Collins, R. L., Martino, S. C., & Shaw, R. (2011). *Influence of new media on adolescent sexual health: Evidence and opportunities*. Working Paper WR-761. Retrieved from <http://aspe.hhs.gov/hsp/11/adolescentsexualactivity/newmedialitrev/index.pdf>.
- Duile Timo & Sukri Tamma (2021) Political language and fake news, Indonesia and the Malay World, 49:143, pp. 82-105
- Good year, Victoria, Kathleen Armour, and Hannah Wood (2018) *The Impact of Social Media on Young People's Health And Wellbeing: Evidence, Guidelines, and Actions*. University of Birmingham.
- Held, David (1993) Democracy: Past, Present, and Possible Futures. *Alternatives: Global, Local, Political*, Vol. 18, No. 3 (Summer), pp. 259-271
- Jacqueline Laughland-Booÿ et.al (2018) "The voting strategies of young people: a conceptual framework". *Australian Journal of Political Science*. Volume 53, Issue 2, pp. 143-159.
- Johnson, L., Levine, A., Smith, R. , Smythe, T., & Stone, S. (2009). *The Horizon Report: 2009 Australia–New Zealand Edition*. Austin, Texas. The New Media Consortium.
- Landman, T. (2011). Assessing the Quality of Democracy: The International IDEA Framework. *European Political Science*, 11(4), pp. 456–468.
- M. Ekstrom and Ostman J. (2013) "Family talk, peer talk, and young people's civic orientation." *European Journal of Communication* 28 (3), pp. 294-308.
- Manning, J. (2014.) *Social media, definition and classes of*. In K. Harvey (Ed.), *Encyclopedia of social media and politics*. pp. 1158-1162.
- Marquis, Lionel (2010) Understanding Political Knowledge and its Influence on Voting Preferences in the 2007 Federal Election. *Swiss Political Science Review*, 16(3), pp. 425–56.
- McAllister, I. (2015). *Internet use, political knowledge and political participation among young voters in Australia*. The Conference Democracy: A Citizen Perspective, Åbo Akademi University, Turku, Finland.

- Nam, T. (2012). Dual effects of the internet on political activism: Reinforcing and mobilizing. *Government Information Quarterly*, 29, pp. 590-597.
- Niels Nørgaard Kristenseng and Trond Solhaug (2016) Students as First-time Voters: The Role of Voter Advice Applications in Self-reflection on Party Choice and Political Identity. *Journal of Social Science Education*, Volume 15, Number 3, pp. 32-42.
- Ohme, Jakob; de Vreese, Claes H.; Albaek, Erik (2017). *The uncertain first-time voter: Effects of political media exposure on young citizens' formation of vote choice in a digital media environment*. *New Media & Society*, doi:10.1177/1461444817745017
- Pastarmadzhieva, D (2015) Political Knowledge : Theoretical Formulations and Practical Implementation. *Trakia Journal of Sciences*, Vol. 13, Suppl. 1, pp 16-21.
- Primandha Sukma Nur Wardhani (2018) "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum". *JUPIIS Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial* 10 (1) 57, pp. 57-62.
- Quintelier, Ellen and Sara Vissers (2008) The Effect of Internet Use on Political Participation: An Analysis of Survey Results for 16-Year-Olds in Belgium. *Social Science Computer Review*. Vol 26, Issue 4, pp. 411-427
- Rohit Razdan, Mohit Das, Ajay Sohoni. 2013. *The Evolving Indonesian Consumer*. Mckinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-evolving-indonesian-consumer> (diakses 1 November 2021).
- Sergiu Gherghina and Brigitte Geissel (2017) "Linking Democratic Preferences and Political Participation: Evidence from Germany. *Political Studies* Vol. 65 (1), pp. 24-42.
- Shah DV, Cho J, Eveland WP, et al. (2005) Information and expression in a digital age modeling Internet effects on civic participation. *Communication Research*, 32(5), pp. 531-565.
- Sukri., Yunus, A., Ekawaty, D. (2021). "The Forming of First-Ame Voters' PoliAcal Preference in Indonesia", *Youth Voice Journal*. pp 1-18.<https://www.rj4allpublications.com/product/the-forming-of-first-time-voters-political-preference-in-indonesia>.
- Tamma, Sukri (2021) Pendidikan Kewarganegaraan dan Pembentukan Preferensi Politik Awal Pemilih Pemula. *Jurnal Politik Profetik*. Volume 9, No. 1, pp. 43-57.
- Utami, Pratiwi (2018) Hoax in Modern Politics: The Meaning of Hoax in Indonesian Politics and Democracy. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 22, Issue 2, November, pp. 85-97.

- van Deth, J. W., Abendschön, S., & Vollmar, M. (2011). Children and politics: An empirical reassessment of early political socialization. *Political Psychology*, 32, pp. 147-173.
- Vicario, M. D., Bessi, A., Zollo, F., Petroni, F., Scala, A., Caldarelli, G., Quattrociocchi, W. (2016). The Spreading of Misinformation Online. *Proceeding of National Academy of Sciences* (3rd ed), Vol. 113, pp. 554-559). Washington: National Academy of Sciences.
- Wojdan, Witold, Krystian Wdowiak, Aleksandra Witas, and Justyna Drogoń (2021) The impact of social media on the lifestyle of young people. *Polish Journal of Public Health*, 130 (1), pp. 8-13